

BAB V KESIMPULAN

Reunifikasi adalah proses panjang untuk mengatasi ketidakpercayaan dan mengatasi kenangan menyakitkan Korea Selatan dan Korea Utara sejak terpisah. Harapan masyarakat terutama masyarakat Korea Selatan untuk mewujudkan kesatuan bangsa yang diwariskan dari leluhur membuat kedua Korea mengambil langkah-langkah menuju reunifikasi. Normalisasi hubungan dan kerjasama menjadi langkah awal untuk membangun rasa saling percaya demi terciptanya reunifikasi secara damai.

Pemimpin Korea Selatan dari periode ke periode selalu membawa isu reunifikasi sebagai salah satu tujuan dalam kebijakannya. Tidak terlepas dari Presiden PaSrk Geun Hye yang mulai memimpin pada tahun 2013 sampai tahun 2016. Presiden Park menjanjikan untuk lebih memperkuat ekonomi Korea Utara yang dilanda krisis ekonomi dan kesejahteraan, memperbaiki keamanan sosial, serta meningkatkan hubungan dengan Korea Utara yang didasarkan pada pembangunan kepercayaan. Melalui kebijakan *Trust-Building Process* atau kebijakan *trustpolitik*, Park Geun Hye berusaha menormalkan hubungan kedua Korea dengan kerjasama-kerjasama terutama dalam bidang ekonomi yang digunakan untuk membangun fondasi bagi reunifikasi.

Namun, pada tahun 2014, Park Geun Hye mulai mengarahkan kebijakan *trustpolitik* sebagai suatu upaya untuk menekankan reunifikasi secara damai dengan tujuan denuklirisasi Korea Utara. Hal ini dikarenakan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Korea Utara dengan meluncurkan roket sejak resminya Park Geun Hye sebagai Presiden Korea Selatan. Nuklir tersebut tentu menimbulkan dampak yang sangat berbahaya, tidak hanya bagi Semenanjung Korea tapi juga kawasan internasional. Terlebih nuklir tersebut membuat Korea Selatan merasa terancam karena kekuatan militernya tidak sebanding dengan Korea

Utara meski mendapat bantuan prajurit maupun persenjataan dari Amerika Serikat.

Maka dari itu, demi mengedepankan reunifikasi untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di antara kedua negara maupun keamanan internasional, Park Geun Hye mulai memanfaatkan kerjasama ekonominya untuk menghentikan ancaman nuklir Korea Utara. Korea Selatan mulai menghentikan kerjasama dan bantuan ekonomi karena dana yang diberikan justru dimanfaatkan oleh Korea Utara untuk mengembangkan nuklir. Korea Selatan mulai mengambil langkah dengan menutup salah satu fondasi penting reunifikasi dan kerjasama dua Korea yang dibentuk pada masa Presiden Kim Dae Jung, yaitu Kawasan Industri Kaesong. Selain itu, Korea Selatan juga mulai menghentikan bantuan ekonomi dan mengurangi bantuan dalam bidang lain.

Implementasi yang berbeda dari kebijakan awal Park Geun Hye mengenai *trustpolitik* maupun kebijakan yang telah dibentuk oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya seperti halnya KIC justru menjadi kemunduran reunifikasi. Isolasi bantuan yang dilakukan oleh Korea Selatan serta pemutusan kerjasama dengan Korea Utara semakin merenggangkan jarak di antara keduanya.

Namun, proses reunifikasi Korea tidak hanya tergantung pada Korea itu sendiri, melainkan juga tergantung pada kekuatan besar, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Amerika Serikat memiliki hubungan yang sangat erat dengan Korea Selatan sejak perjanjian bilateral di tahun 1953, di mana AS mulai mengirimkan pasukan dan membantu militer Korea Selatan. Baik Korea Utara dan Korea Selatan telah merencanakan reunifikasi dengan cara diplomatik tanpa menggunakan kekerasan, tetapi latihan militer bersama antara Korea Selatan dan AS serta misi nuklir Korea Utara telah meningkatkan pertempuran militer dan membuat negosiasi semakin rumit. Tiongkok sebagai negara yang memiliki hubungan dekat dengan Korea Utara sekaligus penyumbang dana terbesar melalui perdagangan membuat Korea Utara masih bisa terus mengembangkan nuklirnya.

Selain itu, hadirnya AS dan Tiongkok di dalam Semenanjung Korea membawa atmosfer tersendiri karena kedua negara besar tersebut saling berkompetisi dalam melakukan hegemoninya di Asia maupun di kawasan internasional. Terlebih mengingat perang masa lalu di mana Tiongkok membantu memerjuangkan Korea Utara sementara AS membantu Korea Selatan. Keduanya turut campur tangan dalam reunifikasi demi mencapai kepentingan agar Korea berpihak sepenuhnya dengan salah satu di antara mereka.

Tidak hanya AS dan Tiongkok, Jepang sebagai negara tetangga Korea sekaligus sekutu AS juga tidak lepas dari masalah reunifikasi. Jepang justru tidak menginginkan reunifikasi karena trauma masa lalu terkait penjajahan Jepang di Korea membuat Jepang khawatir apabila kedua Korea berbalik arah mengancamnya terutama membawa ancaman dalam persaingan ekonomi.

Kurangnya lembaga regional umum di Asia Tenggara membuat prosedur reunifikasi menjadi lebih kompleks. Akibatnya, kedua Korea harus mampu secara mandiri membangun Korea yang bersatu tanpa campur tangan kekuatan eksternal di masalah domestik mereka meskipun sangat sulit karena reunifikasi tidak hanya berpengaruh bagi kawasan di Semenanjung Korea tapi juga internasional.